

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **5.1.1 Pengembangan Website [www.cirebonkota.go.id](http://www.cirebonkota.go.id) dalam Pelaksanaan**

###### ***Electronic Government* di Pemerintah Kota Cirebon**

*Electronic Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah juga sebagai suatu interaksi modern antara pemerintah dengan masyarakat maupun *stakeholder*. Penerapan *electronic government* di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *e-Government* yang merupakan langkah serius pemerintah Indonesia dalam menerapkan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi.

Pelaksanaan *electronic government* di Kota Cirebon dikelola oleh Bidang Layanan *E-Government* Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon dari tahun 2017 sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan *electronic government* di Kota Cirebon. Pengembangan *website* dalam pelaksanaan *electronic government* di pemerintah Kota Cirebon dinilai berdasarkan Tahapan Penerapan *Electronic Government* menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003 saat ini yaitu

- a. Dalam tahap persiapan melihat adanya kesiapan SDM yang mengelola *website* resmi pemerintah sudah dilakukan pelatihan untuk mempertajam kemampuan pegawai. Kemudian dari kesiapan situs informasi, dimana adanya *website* resmi pemerintah sudah berisi informasi-informasi dan juga adanya beberapa *subdomain* OPD.
- b. Dalam tahap pematangan, *website* resmi Kota Cirebon sudah memiliki laman seperti Surat Warga dan juga terdapat *email* yang tercantum sehingga masyarakat dapat berkomunikasi dengan pemerintah melalui *website* [www.cirebonkota.go.id](http://www.cirebonkota.go.id).
- c. Dalam tahap pemantapan, *website* pemerintah Kota Cirebon belum terdapat transaksi secara *online* kepada masyarakat.
- d. Tahap pemanfaatan yaitu tahap terakhir dimana didalam *website* pemerintah Kota Cirebon belum terdapat pelayanan G2G, G2B, G2C yang terintegrasi.

### **5.1.2 Faktor yang Mendorong dan Menghambat Pengembangan *Website* [www.cirebonkota.go.id](http://www.cirebonkota.go.id) dalam Pelaksanaan *Electronic Government* di Pemerintah Kota Cirebon**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengembangan *website* [www.cirebonkota.go.id](http://www.cirebonkota.go.id) dalam pelaksanaan *electronic government* di

Pemerintah Kota Cirebon, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *electronic government* di Kota Cirebon. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan *electronic government* di Pemerintah Kota Cirebon adalah sebagai berikut.

### **5.1.2.1 Faktor yang Mendorong Pengembangan Website di Pemerintah Kota Cirebon**

#### **a. Support**

*Support* merupakan elemen pertama dan paling penting yang harus dimiliki dalam penerapan *electronic government* oleh pemerintah. Adanya dukungan dan keinginan pemerintah menjadi salah satu faktor keberhasilan *electronic government*.

##### **1. Dukungan Pemerintah**

Dukungan pemerintah dalam hal ini menyangkut sejauh mana keinginan pemerintah Kota Cirebon dalam memberikan dukungannya terkait penerapan *electronic government* di Kota Cirebon. Dukungan pemerintah di sini, yaitu dalam bentuk *political will* sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menerapkan *electronic government*. Pemerintah Kota Cirebon telah mendukung penerapan *electronic government*, namun belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya peraturan daerah maupun peraturan walikota yang khusus mengatur tentang pengelolaan *electronic government* di Kota Cirebon.

## 2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu unsur yang harus dilakukan untuk mendukung penerapan *electronic government*. Hal ini dilakukan agar baik pemerintah maupun masyarakat mengetahui dan memahami pemerintahan berbasis elektronik tersebut. Sosialisasi oleh pemerintah Kota Cirebon dilakukan baik di pemerintah maupun di masyarakat. Namun sosialisasi ke masyarakat belum dilakukan secara massif dan belum terdapat sosialisasi secara langsung yang mempertemukan antara pemerintah dengan masyarakat.

### b. *Capacity*

*Capacity* adalah elemen kedua yang mempengaruhi dalam mewujudkan keberhasilan *Electronic Government*, yaitu berupa seberapa besar kemampuan atau keberdayaan pemerintah setempat. Terdapat tiga hal yang harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan *capacity* ini, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Sumber Daya Finansial

Ketersediaan sumber daya finansial untuk menerapkan konsep *electronic government* merupakan salah satu hal mempengaruhi keberhasilan penerapannya di suatu daerah. Sumber daya finansial dalam penerapan *electronic government* di Kota Cirebon berasal dari APBD Kota Cirebon dan anggaran dana untuk penerapan *electronic government* di Kota Cirebon setiap tahunnya fluktuatif atau tidak selalu sama.

## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan penerapan *electronic government* pada suatu daerah. Kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam penerapan *electronic government* di Kota Cirebon tentunya yang memiliki kompetensi di bidang IT atau TIK. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon sebagai unsur yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan *electronic government* di Kota Cirebon memiliki 24 orang pegawai. Hal tersebut menunjukkan bahwa DKIS masih memiliki keterbatasan dalam kuantitas pegawai yang memiliki kompetensi di bidang IT. DKIS hanya memiliki satu orang programmer dan pegawai lainnya yang memiliki latarbelakang pendidikan di bidang IT hanya sekitar 10 orang.

## 3. Infrastruktur Teknologi Informasi

Ketersediaan infrastruktur yang memadai juga merupakan unsur terpenting yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *electronic government*. Tanpa ketersediaan infrastruktur yang mendukung maka penerapan *electronic government* tidak mungkin terwujud. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon telah membangun infrastruktur dan telah mempunyai sarana prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan *electronic government*. Namun dalam hal

infrastruktur jaringan dapat dikatakan masih kurang menunjang dalam penerapan *electronic government* dikarenakan sebagian besar masih menggunakan wireless yang rentan terhadap gangguan.

#### **5.1.2.2 Faktor yang Menghambat Pengembangan *Website* di Pemerintah Kota Cirebon**

Dalam faktor *value*, pelaksanaan *electronic government* harus memiliki *value* atau manfaat didalamnya. Manfaat yang diperoleh dengan adanya penerapan *electronic government* baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Manfaat yang diperoleh setelah adanya penerapan *electronic government* bagi pemerintah Kota Cirebon antara lain adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, meningkatnya kedisiplinan pegawai, mengurangi biaya administrasi, tenaga dan waktu serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Penerapan *electronic government* harus memberikan *value* atau manfaat bagi masyarakat karena masyarakat merupakan pengguna dari adanya penerapan *electronic government*. Melalui adanya *website* resmi Pemerintah Kota Cirebon, masyarakat dapat memperoleh informasi yang mudah dan cepat berkaitan dengan Kota Cirebon. Masyarakat juga dapat berkomunikasi dengan pemerintah Kota Cirebon. Masyarakat dapat mendapatkan pelayanan dengan lebih mudah dan cepat di mana dalam *website* resmi terdapat banyak tautan yang terhubung ke berbagai OPD yang terdapat di lingkungan Kota Cirebon. Namun, banyak masyarakat yang belum pernah mengakses *website* tersebut karena *website* hanya sebatas informasi saja dan kurangnya respon pemerintah dalam menanggapi komentar masyarakat di *website*, sehingga manfaat dengan adanya *website* kurang dirasakan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan penulis guna meningkatkan penerapan *electronic government* di Kota Cirebon yaitu tampilan *website* agar dapat dibuat lebih menarik dan interaktif, serta sarana komunikasi yaitu kolom tanya jawab maupun kritik untuk direspon dan ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat.

Selain itu perlu adanya peraturan atau produk hukum yang mengatur secara rinci penerapan *electronic government* di Kota Cirebon untuk membentengi pelaksanaan *electronic government* tersebut. Untuk meningkatkan anggaran penerapan *electronic government* di Kota Cirebon, perlu diadakan kerjasama dengan *stakeholder* atau pihak swasta. Dalam meningkatkan kemampuan SDM, perlu adanya pelatihan teknis yang dilakukan secara berkala. Untuk meningkatkan kemampuan infrastruktur, perlu adanya pengadaan jaringan yang lebih stabil. Perlu ditingkatkannya sosialisasi yang massif kepada masyarakat tentang keberadaan *electronic government* dan penggunaannya sehingga *electronic government* dapat diterapkan secara maksimal.